

KEBIJAKAN HAMBATAN PERDAGANGAN ATAS PRODUK EKSPOR INDONESIA DI NEGARA MITRA DAGANG*

Oleh : Umar Fakhrudin†

ABSTRAK

Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada penjualan atau pembelian barang dan jasa antar negara tanpa adanya hambatan tarif maupun hambatan non-tarif. Namun demikian, karena tiap-tiap negara mempunyai perbedaan dalam penguasaan sumber daya maka muncul upaya-upaya proteksi terhadap produksi dalam negeri dan kepentingan lainnya dari tekanan pasar internasional melalui pemberlakuan hambatan perdagangan baik tarif dan non tarif (berupa kuota, spesifik produk, dan berbagai persyaratan di luar isu perdagangan) untuk produk-produk impor. Berbagai bentuk hambatan tersebut adalah salah satu penyebab sulitnya meningkatkan kinerja ekspor Indonesia di negara lain. Berdasarkan perhitungan Trade Restrictiveness Indices, Secara

rata-rata hambatan non tarif memberikan tambahan 70 persen terhadap hambatan perdagangan yang berasal dari tarif. Pada 21 negara (dari total 91 negara), kontribusi hambatan non tarif terhadap hambatan perdagangan secara umum lebih besar dari hambatan tarif dan proteksi pada sektor pertanian lebih besar daripada di sektor manufaktur. Secara rata-rata proteksinya dua kali lebih besar. Ini menunjukkan negara-negara yang komposisi ekspornya tergantung pada produk-produk pertanian akan cenderung menghadapi permasalahan akses pasar yang lebih berat dibandingkan dengan negara-negara yang berspesialisasi pada produk-produk manufaktur.

Kata Kunci : hambatan ekspor, tarif, non tarif

PENDAHULUAN

Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada penjualan atau pembelian barang dan jasa antar negara tanpa adanya hambatan tarif

maupun hambatan non-tarif. Perdagangan bebas dapat juga dikatakan sebagai tidak adanya hambatan buatan yang diterapkan pemerintah dalam perdagangan antar individual dan perusahaan yang berada di negara yang berbeda.

* Ringkasan Kajian Puslitbangdaglu tahun 2007

† Calon peneli di Puslitbangdaglu

Menurut pandangan sebagian pakar ekonomi, perdagangan barang dan jasa antar negara sebaiknya berjalan secara bebas atau walaupun harus, dengan pengenaan tarif dan hambatan non tarif lainnya, yang seminimal mungkin. Hal ini berdasarkan pada pendapat bahwa perdagangan yang lebih bebas akan memberikan manfaat lebih banyak bagi kedua negara pelaku dan bagi dunia secara umum, serta meningkatkan kesejahteraan yang lebih besar. Dijelaskan oleh Susastro (2003), selain meningkatkan distribusi kesejahteraan antar negara liberalisasi perdagangan juga akan meningkatkan efisiensi perekonomian.

Namun demikian, karena tiap-tiap negara mempunyai perbedaan dalam penguasaan sumber daya yang menjadi komponen pendukung daya saing, sebagian pakar yang lain berpendapat liberalisasi perdagangan berpotensi menimbulkan dampak negatif karena mendorong persaingan usaha yang tidak sehat. Atas dasar itu maka muncul pandangan pentingnya upaya-upaya proteksi terhadap produksi dalam negeri dan kepentingan lainnya dari tekanan pasar internasional melalui pemberlakuan hambatan perdagangan baik tarif dan non tarif untuk produk-produk impor.

Secara internal, Indonesia mulai mereformasi kebijakan di bidang perdagangan sejak pertengahan dekade 1980-an, ketika terjadi penurunan harga minyak mentah yang merupakan andalan ekspor nasional di pasar dunia. Mengantisipasi hal

tersebut, pemerintah melakukan serangkaian deregulasi ekonomi untuk mendorong ekspor yang diperlukan sebagai penghasil cadangan devisa.

Namun demikian, upaya untuk meningkatkan ekspor non migas Indonesia seringkali menemui hambatan terutama yang berkaitan dengan kebijakan tarif dan non tarif di negara mitra dagang utama Indonesia. Hal ini bertambah sulit ketika melakukan negosiasi perdagangan seringkali pemerintah Indonesia terhambat oleh kekurangan informasi mengenai kebijakan tarif dan non tarif dari negara mitra dagang.

Agar ekspor non-migas Indonesia dapat meningkat sesuai dengan harapan, dan sekaligus memberikan informasi kepada para negosiator Indonesia, maka informasi mengenai kebijakan tarif dan non tarif di negara mitra dagang utama Indonesia menjadi sangat penting. Untuk itu perlu dilakukan kajian mengenai kebijakan hambatan perdagangan atas produk ekspor Indonesia di negara mitra dagang.

Hambatan Tarif Dan Hambatan Non Tarif Dalam Perdagangan Internasional Menurut GATT/WTO

I. Hambatan Tarif dan Non Tarif

a. Tariffs and Tariff-Rate Quotas

Tarif yang merupakan pajak terhadap komoditas impor yang masuk ke dalam suatu negara merupakan salah satu bentuk

intervensi pemerintah yang sudah cukup lama ada dalam aktivitas perekonomian. Ada dua motif ekonomi dari pengenaan tarif terhadap komoditas impor tersebut. Pertama, tarif bisa memberikan penerimaan bagi pemerintah. Kedua, tarif juga dapat membantu perusahaan dan *supplier* dari industri domestik dalam menghadapi persaingan dari serbuan barang-barang impor.

Tariff-Rate Quota (TRQ) adalah suatu konsep yang menggabungkan pengenaan tarif dengan penetapan suatu kuota. Suatu jenis Tariff-Rate Quota (TRQ) biasanya akan mengenakan tingkat tarif yang rendah terhadap sejumlah tertentu yang tetap dari produk impor dan tingkat tarif yang lebih tinggi terhadap produk impor yang melebihi jumlah yang telah ditentukan di awal tersebut. Secara hukum dan berdasarkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), negara-negara diijinkan untuk menggunakan dua jenis tarif dalam format Tariff-Rate Quota (TRQ).

b. *Quota*

Jenis hambatan perdagangan lainnya yaitu hambatan perdagangan non tarif dalam bentuk kuota impor secara eksplisit. Kuota impor dulunya sangat sering digunakan dalam perdagangan produk-produk pertanian. Dengan

kuota, pemerintah membatasi secara ketat jumlah barang yang boleh diimpor dan kemudian merencanakan penentuan jumlah barang-barang yang diproduksi secara domestik.

c. *Voluntary Export Restraint (VER)*

Hambatan perdagangan non tarif lainnya yang juga cukup sering digunakan dinamakan Voluntary Export Restraint (VER) dimana melalui skema ini negara peng-ekspor setuju untuk mem-batasi jumlah ekspornya ke negara pengimpor, walaupun kadang-kadang hal ini dilakukan dengan ancaman pembatasan perdagangan yang lebih ketat lagi. Dalam banyak kasus, eksportir bersedia mengikuti skema Voluntary Export Restraint (VER) karena mereka akan memperoleh keuntungan secara ekonomi melalui harga produk ekspor mereka yang lebih tinggi di pasar negara pengimpor.

d. *Dumping*

Hambatan yang bersifat tarif (tariff barrier) tersebut akan menimbulkan salah satu dampak yaitu : terjadinya pemberlakuan diskriminasi harga dalam pasar domestik negara eksportir dan pasar asing negara importir. Terjadinya pemberlakuan diskriminasi harga, misalnya pemberlakuan harga lebih rendah terhadap barang-barang ekspor yang dijual ke pasaran asing

negara pengimpor, dibandingkan dengan harga normal yang diberlakukan di pasaran domestik negara pengekspor merupakan bentuk dasar praktek dumping.

Menurut Robert Willig, ditinjau berdasarkan tujuan eksportir, kekuaran pasar dan struktur pasar import, ada lima jenis dumping sebagai berikut:

1. *Market Ekspansion Dumping*

Perusahaan pengekspor bisa meraih untung dengan menetapkan "mark-up" yang lebih rendah di pasar impor karena menghadapi elastisitas permintaan yang lebih besar selama harga yang ditawarkan rendah.

2. *Cyclical Dumping;*

Motivasi dumping jenis ini muncul dari adanya biaya marginal yang luar biasa rendah atau tidak jelas, kemungkinan biaya produksi yang menyertai kon-disi dari kelebihan kapasitas produksi yang terpisah dari pembuatan produk terkait.

3. *State Trading Dumping;*

Latar belakang dan motivasinya mungkin sama dengan kategori dumping lainnya, tapi yang menonjol adalah akuisisi moneterinya.

4. *Strategic Dumping;*

Istilah ini diadopsi untuk menggambarkan ekspor yang merugikan perusahaan saingan di negara pengimpor melalui strategi umum negara

pengekspor, baik dengan cara pemotongan harga ekspor maupun dengan pembatasan masuknya produk yang sama ke pasar negara pengekspor. Jika bagian dari porsi pasar domestik tiap eksportir independen cukup besar dalam tolok ukur skala ekonomi, maka memperoleh keuntungan dari besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pesaing-pesaing asing.

5. *Predatory Dumping;*

Istilah predatory dumping dipakai pada ekspor dengan harga rendah dengan tujuan mendepak pesaing dari pasaran, dalam rangka memperoleh kekuatan monopoli di pasar negara pengimpor. Akibat terburuk dari dumping jenis ini adalah matinya perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang sejenis.

Sedangkan apabila ditinjau berdasarkan motive of dumper dan the continuity of his dumping, menurut Viner, dumping ada tiga bentuk, yaitu pertama, sporadic dumping, merupakan dumping yang bersifat tidak tetap. Kedua, dumping as intermitent, bersifat tidak tetap, tidak berkesinambungan, dan dilakukan dalam kurun waktu yang singkat. Ketiga, dumping as persistent, bersifat tetap dan terus menerus, yang berarti merupakan dumping bentuk merugikan dan mengandung unsur dan bersifat sengaja dan direncanakan untuk merebut pangsa pasar produsen barang sejenis negara tuan rumah.

Hambatan Perdagangan Non Tarif Lainnya

a. Persyaratan Kandungan Lokal

Pemerintah dari banyak negara telah sering menggunakan persyaratan kandungan lokal untuk membatasi impor. Tujuannya adalah untuk mendorong perkembangan industri domestik. Persyaratan kandungan lokal biasanya mengharuskan ada porsi atau persentase tertentu dari nilai total produk yang harus diproduksi di dalam negeri agar produk tersebut bisa dijual di pasar domestik. Persyaratan kandungan lokal biasanya dijalankan bersama-sama dengan kebijakan substitusi impor dimana produksi domestik diharapkan akan menggantikan produk impor

b. Import Licenses

Import Licenses terbukti sebagai salah satu mekanisme yang efektif dalam membatasi jumlah impor. Dengan cara ini, para importir barang diharuskan untuk memperoleh ijin dari setiap pengiriman barang yang dilakukan ke dalam negeri. Tanpa harus menggunakan metode kuota secara eksplisit, suatu negara dapat dengan mudah membatasi impornya dengan berbagai cara yang dipilih dalam mengalokasikan ijin-ijin impor tersebut.

c. Import State Trading Enterprises (STEs)

Import State Trading Enterprises (STEs) adalah institusi atau agen-agen pemerintah yang bertindak secara sebagian atau secara penuh sebagai

pembeli tunggal komoditas tertentu dari pasar dunia. Mereka juga biasanya mendapatkan kekuatan monopoli di pasar domestik baik secara penuh atau sebagian dalam penjualan komoditas-komoditas impor tersebut.

Import State Trading Enterprises (STEs) bisa membatasi jumlah impor dengan beberapa cara. Pertama, mengenakan tarif secara implisit terhadap produk-produk impor tertentu dengan membelinya di harga dunia dan menjualnya kembali di pasar domestik pada tingkat harga yang lebih tinggi. Selisih antara harga jual dan harga beli yang dilakukan oleh Import State Trading Enterprises (STEs) sebenarnya menunjukkan adanya tarif yang terselubung. Selain itu, Import State Trading Enterprises (STEs) juga bisa menerapkan kuota secara implisit baik untuk produk-produk impornya, atau juga bisa mengenakan berbagai peraturan impor yang berbiaya tinggi sehingga membuat impor itu menjadi tidak menguntungkan sama sekali lagi.

d. Hambatan Teknis dalam Perdagangan

Semua negara menerapkan peraturan-peraturan teknis dalam melakukan perdagangan internasional seperti : masalah kemasan, definisi produk, labeling, dan lain-lain. Dalam konteks perdagangan internasional, cara-cara ini merupakan bagian dari hambatan-hambatan non tarif.

e. Kebijakan Manajemen Nilai Tukar

Beberapa negara ada yang membatasi impor produk pertanian melalui

kebijakan mengontrol nilai tukar mereka. Dalam batasan tertentu, negara-negara tersebut bisa dan telah menggunakan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi impor dan mendorong ekspor dari semua komoditas. Beberapa negara ada juga yang membatasi produk-produk tertentu melalui penerapan nilai tukar berganda (*multiple exchange rate*) yang membuat para importir harus menggunakan nilai tukar yang berbeda tergantung dari jenis produk yang mereka impor. Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi masalah ketidak-seimbangan dalam neraca pembayaran dan meningkatkan penerimaan bagi pemerintah.

f. **The Precautionary Principle and Sanitary and Phytosanitary**

Prinsip kehati-hatian sudah mulai gencar diajukan dalam berbagai perundingan sebagai justifikasi bagi pemerintah untuk membatasi perdagangan dalam konteks kesehatan dan lingkungan hidup walaupun kadang tanpa mempertimbangkan biaya dan bukti-bukti ilmiah. Pada awalnya pertama sekali diajukan sebagai teknik manajemen rumah tangga di Jerman pada tahun 1930-an yang termasuk beberapa elemen seperti pencegahan, *cost effectiveness*, dan tanggung jawab etis dalam memelihara sistem alam.

Prinsip kehati-hatian selama ini diartikan, oleh beberapa pihak, bahwa semua bahan kimia dan produk teknologi harus dianggap berbahaya sampai bisa dibuktikan sebaliknya. Oleh karena itu dibutuhkan tanggung jawab dari setiap

kegiatan atau aktivitas untuk mengembangkan produk-produk yang aman siap juga untuk bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atau keracunan.

Ketentuan WTO mengenai Sanitary dan Phytosanitary (SPS) dalam peraturan teknis perdagangan secara spesifik menyatakan bahwa setiap negara harus bertanggung jawab untuk mengamankan negara mereka dari masuknya barang-barang impor yang tidak aman atau tidak sehat.

Indikator Dampak Hambatan Perdagangan

a. *Trade Restrictiveness Index (TRI)*.

Trade Restrictiveness Index (TRI) merupakan hasil pengembangan dari Anderson dan Neary (1994, 1996). Index ini mencoba menjawab berapa ekuivalen tarif tunggal (*equivalent uniform tariff*) yang menjaga tingkat pendapatan riil (*kesejahteraan*) tidak berubah.

b. *Overall Trade Restrictiveness Index (OTRI)*

Indeks ini digunakan untuk mengatasi kekurangan dari Trade Restrictiveness Index (TRI) dalam mengetahui seberapa besar dampak hambatan perdagangan dapat mengurangi jumlah impor. Overall Trade Restrictiveness Index (OTRI), yang merupakan penemuan kedua Anderson dan Neary (2003), mencoba menjawab berapa ekuivalen tarif tunggal (*equivalent*

uniform tariff) yang menjaga tingkat impor pada level yang dikehendaki.

- c. *Market-Access Overall Trade Restrictiveness Index (MA-OTRI)*
Market-Access Overall Trade Restrictiveness Index (MA-OTRI) mencoba menjawab pertanyaan berapa ekuivalen tarif tunggal (equivalent uniform tariff) yang dihadapi negara pengekspor X pada pasar dunia (the rest of the world) untuk menjaga tingkat ekspornya pada level yang dikehendaki.

Dalam studi ini, perhitungan ketiga indikator tersebut dirangkum dari hasil studi Kee, Nicita, dan Olarreaga (2006). Tidak seperti Anderson dan Neary (1994, 2003) yang menggunakan Computable General Equilibrium (CGE) model untuk mengestimasi indikator hambatan perdagangan, mereka cenderung menggunakan pendekatan ekonometrik yang intensif sehingga bisa menghindari adanya bias yang berhubungan dengan agregasi tariff lines ke dalam beberapa industri yang diperlukan dalam pembentukan Computable General Equilibrium (CGE) model.

Identifikasi Dan Kuantifikasi Hambatan Non Tarif

Dalam kajian ini, akan dibahas dua metode umum yang sering digunakan dalam analisa hambatan perdagangan non tarif yaitu:

- a. *Trade Coverage Ratio*
Trade Coverage Ratio menggambarkan persentase atau porsi nilai produk dari negara pengekspor j yang terkena hambatan non tarif disuatu negara pengimpor.
- b. *The Frequency Index*
The frequency index menunjukkan persentase atau porsi transaksi impor dari negara j yang terkena hambatan non tarif.

IDENTIFIKASI KEBIJAKAN TARIF DAN NON TARIF YANG MENGHAMBAT EKSPOR NON MIGAS INDONESIA

- I. Hambatan Tarif
- a. Jepang
Tingkat tarif yang dikenakan Jepang terhadap produk-produk impor yang berasal dari Indonesia sangat bervariasi. Dasar penentuan klasifikasi produk impor yang terdapat pada *customs tariff schedule* menggunakan *Harmonized System 9 digit*. Disamping itu, Jepang juga menggunakan tarif eskalasi dimana pengenaan tarif impor didasarkan pada tingkat proses produksi suatu barang. Sebagai contoh, bahan baku dikenakan tarif yang rendah bahkan bisa mencapai 0%, seperti kayu gelondongan dan rotan asalan yang dikenakan tarif 0%. Tetapi, untuk barang setengah jadi yang masuk ke Jepang akan dikenakan tarif yang lebih tinggi. Di sisi lain, Jepang juga masih melakukan diskriminasi tarif

untuk kayu lapis (*polywood*) berdasarkan jenis kayu dan negara asal. Untuk kayu lapis yang berasal dari negara tropis dikenakan tarif yang lebih tinggi dibandingkan dengan kayu lapis yang berasal dari negara beriklim sub-tropis.

Berdasarkan data yang diperoleh dari *The World Integrated Trade Solution (WITS)*, tarif yang diberlakukan untuk ekspor Indonesia ke Jepang seperti produk-produk alas kaki (*footwear*) menghadapi tarif yang paling tinggi sekitar 15 persen, sementara itu produk teh, kopi, dan rempah-rempah (*coffee, tea, matn, spices*) dikenakan tarif yang paling rendah yaitu sebesar 3 persen. Produk pakaian jadi (*art of apparel & cloth knitted*) mengalami hambatan masuk dengan tarif sebesar 9,34 persen. Sementara itu produk kayu dan turunannya yang memberikan sumbangan penerimaan ekspor yang cukup tinggi di atas US\$ 1 juta dikenakan tarif masuk sebesar 3,36 persen.

b. Amerika Serikat

Tarif bea masuk yang berlaku di Amerika Serikat pada umumnya relatif rendah, karena dimasukkan dalam klasifikasi tarif *Most Favoured Nation (MFN)*. Selain itu, Indonesia menikmati bebas tarif bea masuk karena produk ekspornya termasuk dalam produk *Generalized System of Preferences (GSP)*. Tarif impor

Amerika Serikat yang relatif rendah ternyata masih lebih tinggi dibandingkan tarif *Most Favoured Nation (MFN)* yang diberlakukan Amerika Serikat bagi impor dari Kanada, Israel, dan negara-negara Caribbean. Dalam klasifikasi tarif *Most Favoured Nation (MFN)* masih ada beberapa produk yang dikenakan tarif cukup tinggi. Dari 5.224 *tariff lines* dengan HS 6 digit, terdapat 449 *tariff lines* yang berada diatas 10%.

Dari data *The World Integrated Trade Solution (WITS)* yang tersedia, produk tembakau Indonesia menghadapi hambatan masuk yang sangat tinggi dengan tarif 58,3 persen. Sementara untuk produk daging dan ikan hanya dikenakan tarif sebesar 4,6 persen. Beberapa produk ekspor Indonesia yang dikenakan tarif di atas 10 persen adalah *apparel, staple fibres* dan *filaments*.

c. Uni Eropa

Uni Eropa menetapkan tarif masuk untuk produk impor dari Indonesia secara bervariasi. Produk impor yang dikenakan tarif paling tinggi adalah minyak/lemak dari nabati dan hewani sebesar 15,8 persen, dan yang dikenakan tarif paling rendah adalah *man-made fillaments* sebesar 5,13 persen serta teh, kopi dan rempah-rempah sebesar 5,5 persen. Sementara itu, produk lainnya seperti pakaian jadi,

alas kaki dan kayu serta turunannya dikenakan tarif sekitar 7 sampai 9,9 persen.

II. Hambatan Non-Tarif

Produk-produk ekspor Indonesia selain menghadapi hambatan masuk berupa tarif juga harus berhadapan dengan hambatan non tarif yang dikenakan oleh negara-negara mitra dagang. Hambatan non tarif tersebut bahkan sering kali menimbulkan potensi kerugian yang lebih besar bagi Indonesia daripada hambatan-hambatan yang berupa tarif. Hambatan-hambatan non tarif yang biasa di hadapi oleh produk-produk Indonesia biasanya adalah kuota, subsidi, *anti dumping policy*, *automatic import licensing*, *ecolabelling*, regulasi teknis pada masing-masing produk serta hambatan-hambatan non tariff lainnya yang berhubungan dengan *Sanitary* dan *Phytosanitary*.

Beberapa contoh pengenaan hambatan non tarif oleh Jepang terhadap produk Indonesia adalah sebagai berikut: karantina untuk produk buah-buahan dan sayur-sayuran, sistem standar kualitas produk industri, izin investasi komoditi dan usaha jual, sistem kemasan daur ulang, mengatur perlindungan terhadap binatang yang terancam kepunahan, dan lain-lain.

Amerika Serikat juga menerapkan hambatan-hambatan non tarif yang berlaku bagi produk-produk impor dari

Indonesia. Hambatan non tarif tersebut sering ditemukan dalam bentuk sebagai berikut: bea masuk *anti dumping* dan subsidi untuk produk kertas, *anti illegal transshipment* untuk tekstil dan turunannya, *automatic detention* untuk kakao, *intellectual property right protection*, persyaratan yang ketat untuk ekspor udang, *tobacco control act*, *bioterrorism act*, *container security initiative*, dan lain-lain.

Sementara, Uni Eropa juga tidak ketinggalan dalam melakukan proteksi terhadap produk – produk domestik mereka dengan mengenakan hambatan non tarif terhadap impor mereka. Hambatan non tarif yang sering diberlakukan terhadap produk-produk impor Indonesia adalah sebagai berikut: bea masuk anti dumping terhadap serat sintesis dari *polyester*, *ring binder*, dan bahan baku plastik, *white paper of food safety regulation*, uji laboratorium untuk makanan kemasan, pencatuman label untuk produk hewan dan lain sebagainya.

DAMPAK HAMBATAN PERDAGANGAN NEGARA MITRA DAGANG TERHADAP DAYA SAING KOMODITI UTAMA INDONESIA

I. Perkembangan Peran Dan Kinerja Ekspor Komoditi Utama Pada Ekspor Non Migas Indonesia

Ekspor non migas Indonesia pada tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 9,81% dibandingkan tahun

2005. Ekspor pertambangan lainnya meningkat sebesar 40,80%, disusul oleh ekspor industri dan pertanian yang masing-masing meningkat sebesar 16,96% dan 16,83% pada tahun 2005. Selama periode 2002-2006, ekspor non migas meningkat rata-rata sebesar 15,90% per tahun. Ekspor pertambangan lainnya selama periode lima tahun terakhir, meningkat rata-rata sebesar 33,33% per tahun, dan disusul oleh peningkatan rata-rata ekspor industri dan pertanian yang masing-masing sebesar 14,38% dan 6,95% per tahun. Pangsa ekspor non migas Indonesia pada tahun 2006 sebesar 78,96% terhadap total ekspor. Pangsa ekspor industri menduduki urutan pertama, yaitu sebesar 64,51%, disusul masing-masing pangsa pertambangan dan pertanian yang pangsa-nya masing-masing sebesar 11,11% dan 3,34%.

Ekspor pertanian Indonesia yang mengalami peningkatan pada tahun 2006 dibandingkan tahun 2005 antara lain : udang segar/beku yang meningkat sebesar 15,74%; kopi (17,16%); biji coklat (32,46%); kepiting, kerang-kerangan (5,40%); ikan tongkol/tuna (2,64%); buah-buahan (31,70%); biji pala & bunganya dan kapulaga (7,71%). Ekspor industri yang mengalami peningkatan antara lain : pakaian jadi yang meningkat sebesar 12,91%; alat listrik (1,94%); minyak kelapa sawit

(28,26%); industri lainnya (16,47%); tekstil lainnya (9,57%); kertas dan barang dari kertas (22,99%); damar tiruan, bahan plastik (11,27%); organik (23,06%); alas kaki (kulit, karet dan kanvas) (11,99%); dan kayu lapis (9,6%). Ekspor pertambangan yang meningkat pada tahun yang sama antara lain : batu bara dan biji tembaga yang masing-masing meningkat sebesar 39,77%; dan 40,32%.

Ekspor pertanian yang meningkat selama periode 2002-2006 antara lain : udang segar/beku yang meningkat rata-rata sebesar 3,05% per tahun; kopi (30,29%), biji coklat (4,91%); ikan lainnya (9,74%); kepiting, kerang-kerangan (9,96%); buah-buahan (19,86%); biji pala & bunganya & kapulaga (17,02%). Ekspor industri yang meningkat selama periode yang sama antara lain : pakaian jadi meningkat rata-rata sebesar 9,86% per tahun; alat listrik (14,27%); minyak kelapa sawit (23,29%); industri lainnya (17,20%); tekstil lainnya (10,56%); kertas dan barang kertas (7,97%); komputer dan bagian lainnya (16,77%); damar tiruan, bahan plastik (14,93%); organik (14,33%); kayu olahan lainnya (6,28%); alas kaki (8,90%); dan kain tenun (1,36%). Ekspor pertambangan yang meningkat pada periode yang sama antara lain : batu bara yang meningkat rata-rata sebesar 36,83% per tahun dan biji tembaga yang meningkat rata-rata sebesar 28,74% per tahun.

II. Perkembangan Perdagangan Komoditi Utama Dunia

Nilai ekspor Indonesia selama periode 2002-2006 meningkat rata-rata sebesar 15,90% per tahun. Ekspor Indonesia ke Jepang pada periode yang sama meningkat rata-rata sebesar 17,55% per tahun. Ekspor ke Cina (24,21%); Amerika Serikat (11,74%); Uni Eropa (10,70%); dan ASEAN (17,70%) pada periode yang sama. Pangsa ekspor Indonesia ke Jepang pada tahun 2006 sebesar 15,33% atau dengan nilai ekspor mencapai US\$ 12.198,5 juta. Pangsa ekspor Indonesia Cina sebesar 6,87% dengan nilai ekspor sebesar US\$ 5.466,6 juta, pangsa ekspor ke Amerika Serikat (13,42) dengan nilai ekspor sebesar US\$ 10.682,5 juta; ke Uni Eropa sebesar 15,03% dengan nilai ekspor sebesar US\$ 11.962,8 juta; serta pangsa ekspor ke ASEAN mencapai 20,54% atau dengan nilai ekspor US\$ 16.350,1 juta.

Berdasarkan jenis komoditi, perkembangan ekspor Indonesia untuk komoditi electrical machinery equipment parts ke dunia pada tahun 2005 bernilai US\$ 7.328,4 juta. Ekspor electrical machinery equipment parts ke Amerika Serikat mencapai US\$ 1.138,4 juta atau dengan pangsa ekspor sebesar 15,5%, Jepang (US\$ 952.2 juta) dengan pangsa ekspor sebesar 13,0%, dan Uni Eropa (US\$ 823,6 juta) dengan pangsa ekspor 2,2%. Ekspor animal/veg fats & oil ke

dunia sebesar US\$ 4.950,6 juta yang tersebar ke Amerika Serikat mencapai US\$ 104,9 juta, Jepang (US\$ 6,8 juta), dan Uni Eropa (US\$ 1.062,1 juta). Ekspor nuclear reactors and boilers ke dunia mencapai US\$ 4.560.0 juta sedangkan ekspor yang sama ke Jepang sebesar US\$ 621 juta; Uni Eropa (US\$ 516.8 juta); dan Amerika Serikat (US\$ 430.8 juta). Ekspor rubber and articles of wood ke dunia mencapai US\$ 3.580,5 juta, sedangkan ke Amerika Serikat sebesar US\$ 1.028,4 juta, Uni Eropa (US\$ 530.3 juta) serta Jepang (US\$ 521,8 juta). Ekspor ores, slag and ash Indonesia ke dunia mencapai US\$ 3.499,5 juta, dengan penyebaran ekspor ke Jepang sebesar US\$ 975,3 juta, Uni Eropa (US\$ 768,6 juta); Amerika Serikat (US\$ 0,4 juta). Ekspor wood and article of wood ke Jepang mencapai US\$ 879,6 juta; Uni Eropa (US\$ 636,4 juta) dan Amerika Serikat (US\$ 343,7 juta), sedangkan ke dunia mencapai US\$ 3.111,3 juta.

Lebih jauh lagi, jika dilihat berdasarkan pangsa pasarnya, produk ekspor footwear dan sejenisnya memiliki share yang tertinggi ke 25 negara anggota Uni Eropa yaitu sebesar 42,3%, sedangkan produk mineral, oils dan sejenisnya memiliki share yang tertinggi yaitu sebesar 40,4%. Share produk ekspor Indonesia ke Amerika adalah Art of Apparel and clothing access sebesar 60,4%.

III. Analisa Dampak Tarif dan Non Tarif Negara Mitra Dagang terhadap Ekspor Komoditi Utama Indonesia

Pada dasarnya hambatan perdagangan di berbagai negara bukan hanya ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi saja namun juga banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor non ekonomi. Mengingat hal tersebut, maka model yang dikembangkan juga melihat banyak variabel yang didasarkan bukan pada perhitungan di sekitaran ekspor dan impor namun juga menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi perdagangan dari sisi industri dan tenaga kerja. Telah banyak yang meneliti hubungan ini, diantaranya hubungan antara ketidakefisienan suatu industri dengan keinginan suatu negara untuk melakukan proteksi. Proteksi lebih dikarenakan negara-negara tersebut khawatir akan terjadi gejolak akibat ditutupnya industri yang tidak efisien akibat kalah bersaing.

Dalam perkembangannya, sebagai implementasi keikutsertaan Indonesia di dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), maka Indonesia diwajibkan untuk menurunkan tingkat tarif di berbagai sektor. Di saat yang bersamaan, sebenarnya Indonesia juga dapat melakukan hal yang sama terhadap negara-negara mitra dagangnya. Selama ini, kekurangan yang dihadapi adalah menilai seberapa besar pengaruh pengurangan tarif terhadap industri domestik dan sebaliknya apa

dampak pengurangan tarif di negara lain terhadap industri domestik.

- a. Identifikasi Dampak Hambatan Tarif
Bila dilihat dari hasil penghitungan, maka hambatan tarif sebenarnya berhubungan erat dengan skala ekonomi dan intensitas tenaga kerja dalam suatu industri. Bila dilihat dari hubungan antara tingkat tarif dengan skala ekonomis, maka akan dihasilkan angka -2.007 . Artinya adalah bahwa dampak peningkatan tarif sebesar 1, nilai akan mengurangi skala ekonomis suatu industri sebesar -2 . Pengurangan nilai skala ekonomis tersebut disinyalir karena industri-industri tersebut terlena dengan penerapan tarif sehingga akan cenderung lebih boros dalam menggunakan sumber daya. Hal ini memang sejalan dengan pengalaman empiris bahwa dampak dari pengenaan tarif akan menguntungkan industri-industri domestik yang relatif tidak efisien.

Hal lainnya yang dapat diperoleh dari hasil penghitungan ini adalah bahwa dari sisi tenaga kerja terjadi hubungan yang positif, yaitu sebesar $2,5212$. Artinya setiap peningkatan tarif sebesar 1 nilai akan menyebabkan peningkatan intensitas penggunaan tenaga kerja sebesar $2,5212$. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pengenaan tarif akan mengurangi persaingan di

dalam pasar domestik terutama dengan perusahaan dari luar negeri sehingga perusahaan-perusahaan akan lebih leluasa beroperasi dan merekrut tenaga-tenaga kerja.

b. Identifikasi Dampak Hambatan Non Tarif

Identifikasi dampak pengenaan hambatan non tarif relatif lebih sulit dibandingkan dengan hambatan tarif. Hal ini disebabkan oleh sukarnya mengkuantifisir nilai-nilai hambatan perdagangan non tarif di Indonesia. Nilai hambatan perdagangan non tarif akan berpengaruh pada hal-hal: konsentrasi industri, intensitas keahlian, dan heterogenitas komoditas Indonesia.

Nilai dampak hambatan non tarif terhadap konsentrasi industri adalah 0,0021. Nilai ini tidaklah terlalu besar, artinya peningkatan hambatan non tarif sebesar 1 poin hanya akan meningkatkan konsentrasi industri sebesar 0,0021 poin. Peningkatan konsentrasi industri yang sedikit untuk kasus Indonesia ini menjelaskan bahwa keberadaan hambatan non tarif sebenarnya tidak memberikan dampak kepada industri untuk melakukan aglomerasi ataupun memangkas biayanya dengan melakukan efisiensi. Jadi sebenarnya hambatan non tarif ini dapat dialihkan ke dalam hambatan tarif sementara Indonesia menjalankan peraturan dalam Organisasi

Perdagangan Dunia (WTO).

IV. Analisa Dampak Hambatan Perdagangan Negara Mitra Dagang terhadap Daya Saing Komoditi Utama Indonesia

Berdasarkan hasil regresi yang dilakukan, dapat dilihat bahwa konsentrasi industri di Indonesia akan memiliki nilai hubungan tarif Indonesia sebesar satu persen. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun kecil, namun konsentrasi industri menimbulkan tekanan kepada pemerintah untuk menetapkan tarif. Selanjutnya yang menarik untuk dicermati adalah bahwa nilai skala ekonomi memiliki hubungan negatif terhadap tingkat tarif di Indonesia, sedangkan intensitas tenaga kerja memiliki nilai hubungan yang positif.

Dua kenyataan tersebut memperlihatkan bahwa semakin besar intensitas tenaga kerja yang digunakan semakin kecil skala ekonomi akan menyebabkan tarif yang ditetapkan akan semakin tinggi.

Berdasarkan model yang dikembangkan oleh Edward John Ray, menekankan adanya penentu-pentu proteksi perdagangan berupa tarif dan non tarif. Beberapa variabel memang dikembangkan dengan maksud untuk menguji pengaruh-pengaruh variabel lain terhadap hambatan perdagangan. Pengaruh variabel ini akhirnya

dapat dijadikan acuan alternatif dalam rangka mendekatkan hasil tersebut bila dengan menggunakan variabel yang biasa. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah: penghitungan diatas, diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Konsentrasi industri menimbulkan tekanan kepada pemerintah untuk menetapkan tarif. Selanjutnya yang menarik untuk dicermati adalah bahwa nilai skala ekonomi memiliki hubungan negatif terhadap tingkat tarif di Indonesia, sedangkan intensitas tenaga kerja memiliki nilai hubungan yang positif.
2. Tarif berpengaruh terhadap tingkat intensitas penggunaan tenaga kerja di Indonesia. Semakin tinggi tarif yang digunakan, maka akan semakin tinggi penggunaan tenaga kerja di Indonesia. Dengan demikian secara eksplisit dapat dikatakan bahwa tingginya tingkat tarif akan menguntungkan tenaga kerja di Indonesia.
3. Penghitungan juga menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi semakin besar intensitas tenaga kerja yang digunakan semakin kecil skala ekonomi akan menyebabkan tarif yang ditetapkan akan semakin tinggi.
4. Nilai skala ekonomi akan berhubungan terbalik terhadap tingkat tarif

luar negeri. Dapat dikatakan bahwa semakin besar nilai skala ekonomi akan menyebabkan semakin kecilnya tarif yang akan dibebankan kepada suatu negara.

5. Dapat dikatakan bahwa nilai skala ekonomi adalah hal yang penting yang harus ditingkatkan oleh suatu negara dalam hal untuk mengurangi dampak dari pengenaan tarif.
 6. Strategi tersebut memerlukan penghitungan yang matang dengan melihat beberapa variabel yang saling mempengaruhi. Berdasarkan pada hal tersebut, maka prasetasi perdagangan Indonesia juga harus didukung oleh jenis dan struktur industri yang mengitarinya, upah, dan juga skala ekonomis.
 7. Ekspor Indonesia memiliki hubungan positif terhadap variabel-variabel sebagai berikut, yaitu: upah, skala ekonomis, dan proxy hambatan perdagangan luar negeri.
 8. Impor Indonesia akan memiliki hubungan-hubungan positif dengan variabel-variabel sebagai berikut: upah dan proxy terhadap hambatan non tarif luar negeri.
- V. ANALISA DENGAN MENGGUNAKAN TRADE RESTRICTIVENESS INDICES (TRI)
- Hasil analisa dengan menggunakan *Trade Restrictiveness Indices* (TRI)

menemukan beberapa observasi menarik dan penting untuk dibahas. Pertama, hambatan non tarif mempunyai kontribusi signifikan terhadap level hambatan perdagangan. Secara rata-rata hambatan non tarif memberikan tambahan 70 persen terhadap hambatan perdagangan yang berasal dari tarif. Pada 21 (dua puluh satu) negara dari total 91 (sembilan puluh satu) negara, kontribusi hambatan non tariff terhadap hambatan perdagangan secara umum lebih besar dari hambatan tarif. Oleh karena itu, mengabaikan dampak dari hambatan non tarif dalam analisa hambatan perdagangan internasional dapat sangat menyesatkan.

Kedua, *Trade Restrictiveness Indices (TRI)* yang menggunakan tingkat kesejahteraan sebagai acuan selalu lebih besar dari *Overall Trade Restrictiveness Index (OTRI)*. Secara rata-rata *Trade Restrictiveness Indices (TRI)* adalah sekitar 70 persen lebih tinggi dari *Overall Trade Restrictiveness Index (OTRI)*. Perbedaan terbesar antara *Overall Trade Restrictiveness Index (OTRI)* dan *Trade Restrictiveness Indices (TRI)* ditemukan pada negara-negara yang memiliki varian tarif paling besar (lihat Anderson dan Neary, 2003 atau 2004). Negara-negara kaya umumnya mendominasi kelompok dengan *Trade Restrictiveness Indices (TRI)* yang lebih tinggi (dan artinya memiliki varian tarif yang lebih besar pula).

Ketiga, proteksi pada sektor pertanian lebih besar daripada di sektor manufaktur. Secara rata-rata proteksinya dua kali lebih besar. Hanya satu negara yaitu Egypt dalam sampel yang *Overall Trade Restrictiveness Index (OTRI)* untuk produk pertanian-nya, lebih rendah dari pada produk manufakturnya. *Market-Access Overall Trade Restrictiveness Index (MA-OTRI)* produk-produk pertanian, yang menggambarkan hambatan yang dihadapi setiap negara pada produk ekspor pertaniannya secara rata-rata adalah 4 kali lebih tinggi dari *Market-Access Overall Trade Restrictiveness Index (MA-OTRI)* produk manufaktur. Ini menunjukkan negara-negara yang komposisi ekspornya bergantung pada produk-produk pertanian akan cenderung menghadapi permasalahan akses pasar yang lebih berat dibandingkan dengan negara-negara yang berspesialisasi pada produk-produk manufaktur.

Untuk kasus negara-negara mitra dagang Indonesia, nilai hambatan perdagangannya bervariasi. Jepang sebagai contoh, nilai *Overall Trade Restrictiveness Index (OTRI)* untuk tarif saja berkisar sekitar 6 persen. Tetapi jika digabungkan dengan hambatan non tarif nya maka *Overall Trade Restrictiveness Index (OTRI)* Jepang menjadi 14 persen. Ini menunjukkan bahwa hambatan non tarif di Jepang lebih besar dari pada hambatan tarifnya. Kalau dilihat dari hambatan perdagangan berdasarkan jenis produk,

maka produk pertanian impor di Jepang menghadapi *Overall Trade Restrictiveness Index (OTRI)* sebesar 58 persen jauh lebih tinggi dari pada produk manufaktur yang hanya sebesar 7 persen.

Amerika Serikat, sebagai negara adidaya dan juga sebagai salah satu negara tujuan utama ekspor Indonesia, mempunyai komposisi hambatan perdagangan yang mirip dengan Jepang, walaupun secara umum nilainya lebih rendah. Nilai *Overall Trade Restrictiveness Index (OTRI)* yang berasal dari tarif saja rata-rata hanya 3 persen. Nilai ini meningkat menjadi 8 persen jika memasukkan hambatan non tarif. Sama seperti Jepang, Amerika juga menerapkan proteksi yang lebih tinggi pada produk-produk pertanian dibandingkan dengan produk-produk manufaktur. Hal ini terlihat dari *Overall Trade Restrictiveness Index (OTRI)* untuk produk pertanian sebesar 21 persen sementara untuk manufaktur hanya 7 persen.

Studi Kee, Nikita dan Olarreaga (2005) juga menunjukkan adanya kerugian bagi negara-negara yang mengenakan hambatan perdagangan yang ditunjukkan dari besarnya *deadweight loss (DWL)* yang terjadi. Negara dengan *deadweight loss (DWL)* terbesar adalah Jepang dengan nilai \$ 27,5 milyar dan diikuti oleh Korea dengan nilai sekitar \$ 25 milyar. *deadweight loss (DWL)* yang cukup

besar pada kedua negara ini seiring dengan nilai hambatan tarif melalui indeks *Trade Restrictiveness Indices (TRI)* yang juga cukup besar yaitu 33 persen di Jepang dan 48 persen di Korea. Uni Eropa, sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia menepati posisi ketiga dalam besaran *deadweight loss (DWL)* yang terjadi dengan nilai \$ 13,6 milyar dan *Trade Restrictiveness Indices (TRI)* sebesar 14 persen. Posisi ke empat dan ke lima berturut-turut adalah Mexico dengan *deadweight loss (DWL)* sebesar \$ 4,4 milyar dan TRI 21 persen serta Amerika Serikat dengan *deadweight loss (DWL)* sebesar \$ 3,7 milyar dan *Trade Restrictiveness Indices (TRI)* 7 persen. Indonesia sendiri mengalami *deadweight loss (DWL)* sekitar \$ 200 juta dengan *Trade Restrictiveness Indices (TRI)* sekitar 8 persen.

Jika dilihat dari komposisinya, kerugian terbesar bagi negara-negara seperti Jepang, dan Uni Eropa hampir semuanya berasal dari proteksi tarif yang cukup tinggi di sektor pertanian. *Trade Restrictiveness Indices (TRI)* sektor pertanian di ke dua negara tersebut berturut-turut adalah 85%, dan 49%. Sementara untuk Amerika Serikat dan Indonesia, hal yang sebaliknya terjadi. Proteksi tarif di sektor manufaktur lebih tinggi dibandingkan dengan disektor pertanian. Untuk Indonesia, dari sekitar \$ 200 juta kerugian *deadweight loss (DWL)* akibat tarif, yang berasal dari sektor pertanian

hanya sekitar \$ 18 juta atau kurang dari 10 persen.

Lebih lanjut, analisa juga memperlihatkan hubungan antara hambatan perdagangan (dengan indeks *Overall Trade Restrictiveness Index*) yang berlaku di masing-masing negara dan kerugian negara tersebut akibat kehilangan kesempatan melakukan impor (*import loss*). Hasilnya, negara dengan kerugian kehilangan kesempatan impor terbesar dialami oleh Amerika Serikat dengan nilai lebih dari US\$ 90 milyar. Dibandingkan dengan nilai *Overall Trade Restrictiveness Index (OTRI)*-nya yang hanya sebesar 9 persen, Amerika Serikat mengalami kerugian kehilangan impor yang sangat besar. Artinya, walaupun *Overall Trade Restrictiveness Index (OTRI)*-nya cukup rendah, tapi karena potensi volume perdagangan internasional Amerika Serikat cukup besar, hambatan perdagangan yang kecil saja bisa mengurangi nilai perdagangan yang cukup besar. Dan ini akan sangat berpengaruh bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang produk ekspor andalannya banyak bergantung pada pasar Amerika Serikat.

Negara berikutnya yang mengalami kerugian yang juga cukup besar adalah Uni Eropa dengan nilai sebesar US\$ 73 milyar dan. Sama seperti di Amerika

Serikat, Uni Eropa juga menerapkan hambatan perdagangan yang relatif rendah, yaitu sekitar 9 persen. Tetapi, karena negara tersebut juga mempunyai potensi pasar perdagangan dunia yang cukup besar, maka *Overall Trade Restrictiveness Index (OTRI)* yang rendah tersebut bisa menghalangi masuknya impor barang-barang dari negara lain dengan jumlah yang cukup signifikan.

Dari kedua negara tersebut, semuanya mengalami kerugian terbesar yang berasal dari kehilangan impor produk manufaktur, bukannya kehilangan impor produk pertanian. Padahal, hambatan yang diberlakukan pada produk-produk pertanian mereka jauh lebih tinggi dari pada yang berlaku pada sektor manufaktur.

Oleh karena itu, Indonesia, yang ekspornya banyak bergantung pada produk-produk manufaktur perlu benar-benar mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam menembus pasar dunia seperti di Amerika Serikat, Uni Eropa. Apalagi jika dibandingkan dengan volume perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara tersebut, nilai ekspor kita masih sangat rendah. Sehingga, adanya hambatan-hambatan perdagangan baik tarif maupun non tarif yang sedikit saja bisa mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap nilai ekspor Indonesia di negara-negara tersebut. .

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil olahan data dan studi literatur, maka beberapa hal penting dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkembangan ekspor Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan yaitu meningkat rata-rata sebesar 15,90% per tahun. Peningkatan ekspor Indonesia tidak terlepas dari ketentuan tarif bea masuk yang berlaku, produk yang diperdagangkan (tariff reduction) dan penghapusan hambatan non-tarif (non tariff barriers) negara mitra dagang.
2. Perkembangan ekspor Indonesia yang meningkat tersebut memiliki hubungan positif terhadap variabel-variabel sebagai berikut, yaitu: upah, skala ekonomis, dan proxy hambatan perdagangan luar negeri.
3. Sementara untuk impor Indonesia, perkembangannya sangat dipengaruhi dan memiliki hubungan-hubungan positif dengan variabel-variabel upah dan proxy terhadap hambatan non tarif luar negeri.
4. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa nilai skala ekonomi ternyata berhubungan terbalik terhadap tingkat tarif luar negeri. Dalam hal ini semakin besar nilai skala ekonomi akan menyebabkan semakin kecilnya tariff yang akan dibebankan kepada suatu negara, atau untuk kasus ini adalah Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai skala ekonomi adalah hal yang penting yang harus ditingkatkan oleh suatu negara dalam hal untuk mengurangi dampak dari pengenaan tariff.
5. Selain itu, strategi dalam meningkatkan kinerja ekspor memerlukan penghitungan yang matang dengan melihat beberapa variabel yang saling mempengaruhi. Berdasarkan pada hal tersebut, maka prestasi perdagangan Indonesia juga harus didukung oleh jenis dan struktur industri yang mengitarinya, tingkat upah yang berlaku, dan juga skala ekonomis dari masing-masing industri yang menghasilkan komoditi ekspor.
6. Hambatan non tarif mempunyai kontribusi signifikan terhadap level hambatan perdagangan. Secara rata-rata hambatan non tarif memberikan tambahan 70 persen terhadap hambatan perdagangan yang berasal dari tarif. Oleh karena itu, mengabaikan dampak dari hambatan non tarif dalam analisa hambatan perdagangan internasional dapat sangat menyesatkan.
7. Negara-negara di dunia pada umumnya melakukan proteksi pada sektor pertanian yang lebih besar daripada di sektor manufaktur. Secara rata-rata proteksinya dua kali lebih besar. Ini menunjukkan negara-negara yang komposisi ekspornya bergantung pada produk-produk pertanian akan

cenderung menghadapi permasalahan akses pasar yang lebih berat dibandingkan dengan negara-negara yang berspesialisasi pada produk-produk manufaktur.

8. Tingginya tarif yang berlaku suatu negara tertentu mempunyai dampak terhadap pengurangan kesejahteraan (welfare) negara tersebut. Hal ini terlihat dari besarnya deadweight loss (DWL) yang terjadi baik di Jepang maupun Korea yang keduanya memiliki hambatan tarif yang cukup tinggi.
9. Hambatan perdagangan yang relatif kecil ternyata bisa memberikan dampak pengurangan impor yang cukup besar seperti yang terjadi di Amerika Serikat, Uni Eropa, yang kedua-duanya merupakan mitra dagang utama Indonesia.
10. Indonesia perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk terus bisa menembus pasar dunia sekaligus memperluas pangsa pasar ekspornya. Namun demikian, perlu strategi yang hati-hati dalam melakukan kebijakan perdagangan terutama dalam hal hambatan perdagangan. Penerapan atau pencabutan hambatan perdagangan terhadap produk impor maupun ekspor bisa mempunyai dampak yang positif atau negatif yang bergantung pada perkembangan pasar perdagangan dunia.

SARAN-SARAN

1. Hambatan non tarif dapat mengurangi daya saing dan tingkat kesejahteraan, sehingga perlu dilakukan lobby di setiap sidang organisasi perdagangan dunia untuk menekan negara yang menerapkan hambatan non tarif menjadi hambatan tarif. Dengan mendesaknya, Indonesia akan lebih mudah menjalankan strategi penekanan penurunan tarif di negara tujuan ekspor
2. Perlu adanya sistem informasi yang tepat dan akurat mengenai berbagai jenis hambatan perdagangan, terutama informasi mengenai hambatan non tarif, yang dapat membantu pengusaha untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan dalam menembus pasar global.
3. Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, liberalisasi sektor pertanian di Indonesia sebaiknya juga mempertimbangkan perkembangan yang terjadi di negara-negara lain yang pada umumnya menerapkan proteksi yang cukup tinggi untuk produk pertanian mereka. Oleh karena itu pemerintah harus berani dan mampu bernegosiasi mengenai tingkat proteksi sektor pertanian yang tepat, baik pada pertemuan bilateral, regional maupun multilateral.

4. Peluang peningkatan ekspor melalui produk-produk manufaktur cukup terbuka karena menghadapi proteksi yang relatif lebih kecil dibandingkan sektor pertanian. Oleh karena itu pemerintah seharusnya memberikan insentif yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan sektor manufaktur Indonesia seperti melalui pembebasan bea masuk bahan-bahan input yang diperlukan dalam proses produksi.
5. Ekspor Indonesia memiliki hubungan positif terhadap variabel-variabel seperti upah, skala ekonomis, dan proxy hambatan perdagangan luar negeri. Efisiensi akan menurunkan biaya dan kemudian harga, sehingga proteksi non tarif yang dibebankan oleh negara pengimpor akan dapat sedikit teratasi, terutama yang berpotensi dapat meningkatkan biaya tambahan.
6. Hambatan perdagangan yang relatif kecil ternyata bisa memberikan dampak pengurangan impor yang cukup besar seperti yang terjadi di Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang yang ketiga-tiganya merupakan mitra dagang utama Indonesia. Indonesia perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk terus bisa menembus pasar dunia sekaligus memperluas pangsa pasar ekspornya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E. and J. Peter Neary (1991), "A New Approach to Evaluating Trade Policy", World Bank Working Paper, World Bank, Washington DC.
- Anderson, James E. and J. Peter Neary (1994a), "Welfare versus market access: The implications of tariff structure for tariff reform", *Journal of International Economics*, Vol. 71, pp. 187–205
- Baldwin, Robert (1989), *Measuring Nontariff Trade Policies*, NBER Working Paper No. 2978, NBER, Cambridge, Mass.
- Bhagwati, Jagdish (1988), *Protectionism*, MIT Press, Cambridge, Mass.
- Bora, Bijit, Aki Kuwahara and Sam Laird (2002), "Quantification of Non-Tariff Measures" Policy Issues in International Trade and Commodities Study Series, No. 18, UNCTAD, United Nations, New York and Geneva.
- Fleisher, Craig S. and Babette E. Bensoussan (2003), *Strategic and Competitive Analysis*, Pears Education International.
- Daly, Michael and Hiroaki Kuwahara (1997), "Examining Restraints on Trade" *The OECD OBSERVER*, No. 203, January.

Deardorff, Alan and Robert Stern (1998), "The Measurement of Non-Tariff Barriers", OECD Economics Department Working Papers No. 179, OECD, Washington DC.

Deardorff, Alan V. and Robert Stern (1985), *Methods of Measurement of Non tariff Barriers*, UNCTAD, United Nations, Geneva (Document No. UNCTAD/ST/MD/28).

Skousan, Mark (2005), *Teori-teori Ekonomi Modern*, Prenada.

Statistik Ekspor dan Impor Indonesia, 2007, BPS.

Nicita, Alessandro and Marcelo Olarreaga (2006), "Trade, Production and Protection 1976-2004", *World Bank Economic Review*, Vol. 12, No. 3, October, pp 121-149.

Nicita, Alessandro, Hiau Looi Kee, and Marcelo Olarreaga (2006), "Estimating Trade Restrictiveness Indices", World Bank Policy Research Working Paper No. 3840, World Bank, Washington D.C.

Pacific Economic Cooperation Council (PECC) (2001), *Impediments to Trade and Investment in the APEC Region*, PECC Secretariat, Singapore.

Newfarmer, Richard (2006), "Trade, Doha and Development", World Bank Working Paper, World Bank, Washington D.C.

UNCTAD (1993), *A Users. Manual for TRAINS (Trade Analysis and Information System)*, United Nations, Geneva (UNCTAD/DMS/1).

UNCTAD (2005), *Methodologies, Classifications, Quantification and Development Impacts of Non-Tariff Barriers*, United Nations, Geneva (TD/B/COM.1/EM.27/2)

Wilson, John S. and Tsunehiro Otsuki (2004), "Standards and Technical Regulations and Firms in Developing Countries: New Evidence from A World Bank Technical Barriers to Trade Survey", World Bank Working Paper, World Bank, Washington D.C.